

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG TENGAH)

Muhammad Arsy Perwira Witono

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Email: marsyperwiraw@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The illegal placement of Indonesian Migrant Workers (PMI) remains a serious issue in Indonesia, with many victims trapped in exploitation and abuse by labor syndicates. The Public Prosecutor (JPU) plays a key role in enforcing the law against the perpetrators of this crime, but the implementation of justice is often hindered by discrepancies between the prosecutor's demands and the court's verdicts. This study aims to analyze the role of the Public Prosecutor in upholding justice for victims of illegal PMI placement through legal efforts such as appeals and cassation, as well as identifying the obstacles encountered in the legal process. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews with the Public Prosecutor, judges, and migrant worker protection agencies. The findings indicate that although the Public Prosecutor strives to demand appropriate penalties, various external and internal factors influence judicial decisions, thus justice for victims has not been fully realized. This study provides recommendations to improve coordination among law enforcement agencies and enhance protection for Indonesian migrant workers.</i></p> <p>Keyword: Public Prosecutor, Migrant Worker Crimes, Law Enforcement, Legal Efforts, Court Decisions, Illegal PMI.</p> <p>Abstrak <i>Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan banyaknya korban yang terjebak dalam eksplorasi dan penyalahgunaan oleh sindikat penyalur tenaga kerja. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memainkan peran kunci dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini, namun implementasi keadilan sering terhambat oleh ketimpangan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPU dalam menegakkan keadilan bagi korban penempatan PMI ilegal melalui upaya hukum yang dilakukan, seperti banding dan kasasi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Jaksa Penuntut Umum, hakim, dan lembaga perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun JPU berusaha maksimal untuk menuntut hukuman yang setimpal, banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan hakim, sehingga keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.</i></p>

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Kejahatan Penempatan Pekerja Migran, Penegakan Hukum, Upaya Hukum, Keputusan Hakim, PMI Ilegal.

A. PENDAHULUAN

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia, mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Keberadaan PMI sangat penting bagi perekonomian Indonesia, mengingat kontribusinya yang besar terhadap devisa negara. Namun, masalah utama yang muncul adalah penempatan pekerja migran yang tidak melalui prosedur yang sah, yang berujung pada penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap mereka. Penempatan PMI ilegal tidak hanya merugikan pekerja itu sendiri, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan hukum yang lebih besar. Salah satu permasalahan utama dalam penempatan PMI ilegal adalah ketidakmampuan sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi para pekerja migran, serta minimnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja yang sering terlibat dalam praktik ilegal (Astuti, 2025).

Secara historis, Indonesia telah lama menjadi negara pengirim pekerja migran, terutama ke negara-negara Timur Tengah, Malaysia, dan beberapa negara di Asia Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penempatan PMI ilegal semakin marak terjadi, di mana agen atau pihak ketiga melakukan penempatan tanpa prosedur yang sah, sehingga berpotensi menjerat pekerja migran dalam kondisi yang sangat buruk (Devi et al., 2025). Penempatan ilegal ini sering kali dilakukan oleh sindikat yang tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja, tetapi juga memperdagangkan manusia, dengan menempatkan pekerja dalam situasi perbudakan modern atau bahkan perdagangan orang. Keadaan ini membuat pekerja migran Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penipuan, serta pelecehan, baik fisik maupun psikis (Handayani, 2025).

Dalam hal ini, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan bagi para korban. Sebagai wakil negara dalam sistem peradilan pidana, JPU memiliki tugas untuk menuntut para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penempatan PMI ilegal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, meskipun JPU telah berupaya keras dalam penuntutan, praktik penempatan PMI ilegal masih seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim yang dijatuhkan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem peradilan, yang pada gilirannya merugikan para korban yang seharusnya mendapatkan keadilan yang lebih besar (Silangit, 2025).

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang terjadi, seperti yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN.Gns, jaksa menuntut hukuman

lima tahun penjara bagi pelaku tindak pidana penempatan PMI ilegal, namun hakim hanya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Ketimpangan ini semakin parah ketika Pengadilan Tinggi juga memutuskan untuk menurunkan hukuman lebih lanjut menjadi satu tahun penjara. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan kasasi, Mahkamah Agung akhirnya menguatkan keputusan tersebut. Ketimpangan ini mengundang keprihatinan atas sejauh mana sistem peradilan dapat memberikan keadilan bagi korban yang menjadi objek eksploitasi dan perdagangan manusia (Hermanto, 2025). Dalam kasus ini, JPU tidak hanya berjuang untuk menuntut hukuman yang sesuai, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan yang layak diterima oleh korban.

Permasalahan ketimpangan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim ini mencerminkan adanya kekosongan dalam sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja migran. Meskipun ada undang-undang yang jelas mengatur tentang perlindungan pekerja migran, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun implementasi hukum tersebut dalam praktik sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi. Hukum sering kali tidak dapat memberikan sanksi yang setimpal dengan kejadian yang dilakukan, yang menyebabkan pelaku sering lolos dari hukuman berat yang sebenarnya dapat memberi efek jera (Muchlis, 2025). Hal ini memperlihatkan adanya masalah dalam aplikasi hukum di tingkat peradilan, di mana keputusan yang diambil oleh hakim tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban.

Tugas utama JPU dalam perkara penempatan PMI ilegal adalah memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dengan kejadian yang telah dilakukan. Selain itu, JPU juga harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi sepanjang proses hukum. Untuk itu, diperlukan keterampilan dan penguasaan hukum yang lebih mendalam, baik dari sisi substansi hukum yang berlaku maupun dari sisi argumentasi yang dapat menguatkan tuntutan dalam proses persidangan. Namun, JPU tidak hanya terbatas pada perannya sebagai penuntut dalam perkara pidana. Mereka juga harus berperan sebagai penjaga keadilan, yang memperjuangkan hak-hak korban dan memastikan bahwa sistem peradilan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Kumontoy et al., 2024).

Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi oleh JPU dalam menangani perkara penempatan PMI ilegal sangatlah kompleks. Selain menghadapi ketimpangan dalam keputusan hakim, JPU juga harus berhadapan dengan berbagai masalah struktural dan administratif, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, keterbatasan bukti yang kuat, serta terhambatnya proses pengumpulan data yang diperlukan dalam

persidangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini menyebabkan banyak kasus penempatan PMI ilegal yang tidak dapat ditangani dengan baik, sehingga hak-hak korban sering kali terabaikan (Nabila et al., 2025).

Selain tantangan dalam penegakan hukum, ketidaksetaraan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memberikan putusan yang objektif dan adil. Sering kali, hakim dihadapkan pada pertimbangan lain di luar bukti-bukti yang ada dalam perkara tersebut, yang menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan tuntutan jaksa. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana pengaruh faktor-faktor eksternal ini dalam mempengaruhi keputusan pengadilan serta bagaimana JPU berusaha untuk mengatasi tantangan ini dalam memperjuangkan keadilan bagi korban (Jatmiko & Fariana, 2025).

Penting untuk dicatat bahwa upaya hukum seperti banding dan kasasi yang dilakukan oleh JPU bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan yang nyata bagi korban. Namun, dalam praktiknya, meskipun JPU sudah berusaha keras, hasil dari upaya hukum tersebut sering kali tidak memberikan hasil yang sesuai dengan harapan korban. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menegakkan keadilan dalam perkara penempatan PMI ilegal, yang mengarah pada ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Suriyati et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan keadilan bagi korban penempatan PMI ilegal, dengan menggali lebih dalam bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh JPU dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh JPU dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI ilegal.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal melalui upaya hukum atas putusan hakim. Pendekatan kualitatif dipilih

karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih kompleks dalam praktik peradilan dan bagaimana JPU menjalankan tugasnya dalam memperjuangkan keadilan bagi korban, di tengah berbagai tantangan yang ada. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses hukum, seperti hambatan yang dihadapi oleh JPU, serta dinamika antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang dihasilkan oleh pengadilan.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, data primer dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam kasus penempatan PMI ilegal di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran JPU, bagaimana mereka menyusun argumen hukum, dan kendala apa saja yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan hakim yang terlibat dalam perkara tersebut untuk memahami perspektif mereka dalam memberikan putusan, serta bagaimana mereka mempertimbangkan tuntutan jaksa dalam menetapkan hukuman. Lembaga perlindungan pekerja migran juga akan dilibatkan untuk memberikan informasi terkait dengan dampak penempatan PMI ilegal terhadap korban dan peran mereka dalam mendukung proses hukum.

Selain wawancara, data sekunder akan dikumpulkan melalui analisis dokumen yang relevan dengan kasus yang diteliti. Dokumen-dokumen ini meliputi putusan pengadilan dari berbagai tingkatan, seperti putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, yang terkait dengan perkara penempatan PMI ilegal. Melalui analisis dokumen ini, peneliti dapat melihat bagaimana keputusan-keputusan hukum yang diambil mempengaruhi para korban dan bagaimana mekanisme hukum diterapkan dalam kasus penempatan PMI ilegal. Selain itu, dokumen dari lembaga-lembaga terkait, seperti laporan tahunan Kejaksaan dan lembaga perlindungan pekerja migran, juga akan dianalisis untuk memperoleh informasi tentang upaya perlindungan hukum bagi pekerja migran dan bagaimana lembaga-lembaga ini berinteraksi dalam menangani kasus penempatan PMI ilegal.

Analisis data akan dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Tema-tema ini akan mencakup peran JPU dalam menegakkan keadilan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh JPU dalam penuntutan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Setelah data dikelompokkan, peneliti akan menganalisis hubungan antara tema-tema tersebut untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana peran JPU dan keputusan hakim berkontribusi dalam menegakkan keadilan bagi

korban PMI ilegal. Analisis ini juga akan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hukum, seperti tekanan sosial atau politis, yang dapat mempengaruhi hasil persidangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal telah menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan para pekerja migran, tetapi juga berdampak pada integritas sistem hukum Indonesia. Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran yang diperlakukan secara tidak sah sering kali menyebabkan mereka menjadi korban eksloitasi, penipuan, serta tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dihukum secara proporsional. Meskipun JPU memiliki peran yang strategis dalam sistem peradilan pidana, namun sering kali mereka dihadapkan pada berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya, seperti ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dengan keputusan hakim yang dijatuhkan (Handayani, 2025). Hal ini berimbang pada ketidakpuasan terhadap sistem peradilan dan pada akhirnya merugikan para korban yang seharusnya mendapatkan keadilan yang lebih besar.

Peran JPU dalam menegakkan keadilan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk menyusun tuntutan yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, JPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tuntutan yang diajukan mencerminkan keadilan bagi korban, serta menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meskipun JPU sudah berupaya untuk menuntut hukuman yang setimpal, sering kali terjadi ketimpangan antara tuntutan jaksa dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus penempatan PMI ilegal, meskipun JPU menuntut pelaku dengan pidana penjara yang cukup lama, hakim sering kali memberikan hukuman yang lebih ringan, yang tidak mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Fenomena ini sangat disayangkan karena bisa memberi pesan yang keliru bahwa tindakan penempatan PMI ilegal tidak dianggap serius oleh sistem peradilan (Silangit, 2025).

Tantangan yang dihadapi oleh JPU tidak hanya terletak pada ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, tetapi juga pada kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung proses penuntutan. Banyaknya kasus penempatan PMI ilegal yang tidak dapat

dibuktikan secara jelas dengan bukti yang sah membuat JPU kesulitan dalam memulai proses penuntutan. Dalam hal ini, koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, Imigrasi, dan lembaga perlindungan pekerja migran, sangat penting. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga ini, proses pengumpulan bukti yang diperlukan untuk memperkuat tuntutan jaksa menjadi sangat terbatas. Hal ini menghambat proses hukum yang seharusnya memberikan keadilan bagi korban, sehingga banyak kasus penempatan PMI ilegal yang tidak dapat ditangani dengan baik (Devi et al., 2025). Terlebih lagi, para korban sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap lembaga-lembaga yang dapat melindungi hak mereka, sehingga mereka tidak dapat memberikan bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat tuntutan hukum.

Selain itu, sistem peradilan Indonesia juga sering kali menghadapi kendala administratif yang memperlambat proses pengadilan. Dalam kasus-kasus penempatan PMI ilegal, pengumpulan dokumen dan bukti dari berbagai pihak yang terlibat sering kali terlambat atau tidak lengkap, yang menyebabkan proses persidangan terhambat. Masalah ini semakin diperburuk dengan rendahnya kapasitas administrasi yang ada di lembaga-lembaga penegak hukum, yang menghambat kelancaran jalannya persidangan. Penelitian oleh Handayani (2025) menunjukkan bahwa ketidakberesan dalam sistem administrasi ini menjadi salah satu kendala besar yang menghambat kecepatan penyelesaian perkara dan akhirnya menunda penegakan keadilan bagi korban.

Selain faktor administratif, faktor eksternal juga mempengaruhi jalannya proses hukum. Di Indonesia, ada kecenderungan bahwa keputusan hukum yang diambil oleh hakim sering dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sosial dan politis. Meskipun JPU sudah menuntut dengan bukti yang kuat dan argumentasi hukum yang meyakinkan, keputusan hakim kadang-kadang tidak sejalan dengan tuntutan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dari luar, baik itu tekanan politik atau sosial yang mempengaruhi independensi hakim dalam memberikan putusan. Sebagai contoh, dalam kasus penempatan PMI ilegal, hakim sering kali mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan kasus tersebut, seperti kepentingan sosial atau politik yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Hal ini sangat merugikan para korban, yang mengharapkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nabila et al., 2025). Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk kondisi para pekerja migran yang menjadi korban.

Salah satu contoh konkret dari ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat dilihat dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN.Gns. Dalam kasus ini, JPU menuntut pelaku dengan pidana penjara lima tahun, namun hakim menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan, yakni hanya dua tahun penjara. Ketidakadilan ini semakin jelas ketika putusan banding di Pengadilan Tinggi justru menurunkan hukuman menjadi satu tahun penjara. Meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya. Kasus ini mengungkapkan adanya ketimpangan yang besar antara tuntutan hukum yang diajukan oleh JPU dan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang jelas tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban (Hermanto, 2025).

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun JPU telah berusaha keras untuk menuntut hukuman yang sesuai, berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mempengaruhi keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kapasitas JPU dalam menghadapi tantangan ini, baik dari segi pengumpulan bukti, penyusunan argumentasi hukum, maupun pengaruh eksternal yang mempengaruhi jalannya persidangan. Selain itu, perlu ada peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus penempatan PMI ilegal ditangani dengan lebih efisien dan adil (Muchlis, 2025).

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun JPU berusaha untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, faktor internal dalam lembaga penegak hukum juga mempengaruhi keberhasilan mereka dalam menangani kasus. Terutama, terbatasnya anggaran dan sumber daya yang tersedia bagi Kejaksaan Negeri untuk menangani kasus-kasus besar seperti penempatan PMI ilegal menjadi kendala yang signifikan. Meskipun JPU memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak korban, keterbatasan tersebut menghambat efisiensi dan efektivitas proses hukum (Suriyati et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perbaikan dalam sistem pendanaan dan alokasi sumber daya di lembaga penegak hukum untuk mendukung upaya mereka dalam menangani kasus-kasus penempatan PMI ilegal dengan lebih maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam memperjuangkan keadilan. Ketimpangan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, kurangnya bukti yang kuat, keterbatasan administratif, serta pengaruh eksternal yang

mempengaruhi keputusan pengadilan, semuanya menjadi tantangan yang dihadapi oleh JPU. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal penanganan perkara penempatan PMI ilegal, agar korban dapat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi JPU dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa meskipun JPU memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penempatan PMI ilegal, mereka menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas tugas mereka dalam memperjuangkan keadilan.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya ketimpangan yang signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam perkara penempatan PMI ilegal. Meskipun JPU telah menuntut dengan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN.Gns, keputusan hakim seringkali lebih ringan dari tuntutan tersebut, yang menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan korban. Ketimpangan ini menjadi semakin jelas ketika pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tidak memberikan hasil yang sesuai dengan tuntutan jaksa, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan yang diterima oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendalam dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang harus segera diperbaiki.

Tantangan lainnya yang dihadapi JPU adalah kurangnya bukti yang kuat dan keterbatasan administratif dalam proses pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung tuntutan hukum. Proses hukum yang lambat, disertai dengan terbatasnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, menjadi hambatan besar dalam menangani kasus-kasus penempatan PMI ilegal dengan efisien. Selain itu, faktor eksternal, seperti tekanan sosial dan politis, turut memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan putusan yang tidak selalu objektif dan adil.

Meski demikian, upaya hukum yang dilakukan oleh JPU melalui banding dan kasasi tetap memberikan dampak positif dalam beberapa kasus, meskipun tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan peningkatan koordinasi antar

lembaga penegak hukum, terutama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga perlindungan pekerja migran, untuk memperkuat proses penuntutan. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem administrasi di lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa setiap kasus penempatan PMI ilegal ditangani dengan lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, meskipun JPU memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan bagi korban PMI ilegal, perbaikan sistem peradilan dan penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dapat dicapai secara adil dan proporsional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2025). Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(05), 1-14.
- Devi, A. M. K., Dewi, A. A. S. L., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2025). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyalundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Secara Ilegal Ke Luar Negeri. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(2), 124-130.
- Handayani, N. (2025). Analisis Pergeseran Tanggung Jawab Negara Terhadap Beban Perlindungan Kepada Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(2), 48-60.
- Hermanto, B. (2025). ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENEMPATAN PEKERJA ILEGAL MIGRAN INDONESIA STUDI PUTUSAN NO 107/PID. SUS/2024/PN RHL. *Tugas_Akhir (Artikel) Jurnal Autentik: Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora*, 3(2), 93-100.
- Kumontoy, N. H., Simandjuntak, R., & Kumajas, M. L. (2024). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Constituendum*, 6(02), 79-91.
- Muchlis, A. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Mati. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 1006-1031.
- Nabila, S., Bong, N. T., Eldestza, N. Z., Ramadhan, M. F. K., Syukur, A., Raihan, A., ... & Azizah, S. N. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Untuk Meningkatkan Nasionalisme Pada Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(1), 18-25.
- Silangit, N. T. (2025). Peranan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Pelaksanaan Putusan

Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(1), 16-25.

Suryati, S., Arifullah, A., & Prisalina, E. P. (2024). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bone. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 2(2), 163-175.